

BAB II

PERKEMBANGAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SDGs) DAN KEHADIRAN UNILEVER DI INDONESIA

Dalam bab ini akan memaparkan tentang struktur dan sasaran SDGs serta pemaparan komitmen pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan program SDGs itu sendiri. Penulis juga menyertakan profil dan sejarah masuknya Unilever di Indonesia sebagai salah satu *multinational corporation* yang turut menjadi aktor penting dalam perwujudan agenda SDGs, kajian terhadap Unilever juga digunakan untuk menginterpretasikan dampak kehadirannya terhadap sekitar yang menjadi asumsi dari tanggung jawab Unilever terhadap lingkungan dan sosial masyarakat Indonesia.

A. Sustainable Development Goals (SDGs)

Lahir dengan nama *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan sebuah inisiatif global yang bertujuan untuk menciptakan kualitas kehidupan manusia kearah yang lebih baik dalam aspek ekonomi maupun sosial dengan catatan bahwa kegiatan yang akan dibentuk dan dilaksanakan tetap dapat bersinergi dengan baik terhadap aspek lingkungan.



Sumber: Sustainable Development Goals Knowledge Platform

Sejak tahun 2016, SDGs yang berlaku sejak tahun 2015-2030 secara resmi menggantikan pendahulunya yaitu *Millenium Development Goals* (MDGs) yang telah berlaku sejak 2000–2015. SDGs tersusun atas dasar seperangkat tujuan bersifat transformatif yang disepakati dan berlaku bagi seluruh bangsa tanpa terkecuali (Zaki, 2016). Pada masa pembentukannya, tidak dapat dipungkiri bahwa tujuan-tujuan dari program inisiatif global ini tidak dapat mengesampingkan pengimplementasian yang tidak hanya pada level internasional, namun juga sampai kepada tingkat nasional maupun regional (Fitri, 2016). SDGs lahir dengan turut mengadopsi beberapa kesepakatan internasional, diantaranya:

- 1) *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction* (Maret, 2013)
- 2) *Addis Ababa Action Agenda on Financing for Development* (Juli, 2015)
- 3) *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development* (September, 2015)
- 4) *Paris Agreement on Climate Change* (Desember, 2015)

Saat ini, sebuah forum *High-level Politic* pada pembangunan berkelanjutan dibentuk dan rutin diadakan oleh PBB sebagai media untuk terus mengawasi dan mengevaluasi SDGs (Nations, 2016). Forum tersebut menjadi wadah untuk seluruh *stakeholders* untuk ikut serta dalam mengevaluasi dan mengawasi perkembangan agenda SDGs di seluruh dunia.

1. Struktur dan Sasaran SDGs

Dalam presentasinya, J. Rockstrom dan P. Sukhdev menyebutkan bahwa SDGs memiliki 17 Tujuan umum dengan 109 indikator utama dan 111 indikator tambahan yang diusulkan oleh *Sustainable Development Solution Network* (SDSN) (Agus Sutopo, 2014). Indikator digunakan sebagai tujuan dan pengukur keberhasilan perwujudan program SDGs yang terbagi ke dalam 3 elemen penting dalam kehidupan, yaitu: *Economy, Society, & Biosphere* (Nations, 2016).



Sumber: presentasi J. Rockstrom dan P. Sukhdev pada EAT Conference.

Keseluruhan tujuan dari agenda SDGs tersebut memuat segala jenis pembangunan dunia di dalam berbagai macam sektor, 17 tujuan SDGs tersebut ialah :

a. Kesejahteraan dan Ekonomi (*Economy*)

Manusia dan aktivitasnya yang berjalan saat ini kerap sekali mendapatkan banyak tantangan dari berbagai macam aspek penyokong berjalannya siklus kehidupan, salah satunya permasalahan ekonomi. Fakta-fakta kemiskinan di dunia masih menjadi permasalahan serius yang harus segera diselesaikan oleh seluruh aktor yang bertanggung jawab di

dalamnya demi kemaslahatan seluruh manusia yang hidup di bumi. Bank dunia mencatat terdapat 10,7% dari populasi seluruh umat manusia di bumi tehipit dalam jeratan kemiskinan. Lebih dari 767 juta jiwa hidup pada taraf di bawah garis kemiskinan dimana mereka dalam mencukupi kebutuhan dengan membelanjakan pengeluaran sebesar USD1.90 atau 25.000 dalam Rupiah per harinya dan juga lebih dari 39% populasi dunia tidak mendapatkan pendidikan secara formal (Ferreira, 2017). Sepanjang tahun 2017, ketidakstabilan sistem politik dan juga ditambah dengan perang dan konflik yang berkepanjangan di wilayah benua Afrika membuat negara-negara di dalamnya masih mendominasi daftar negara-negara termiskin di dunia (Koran Sindo, 2018). Dari permasalahan ekonomi dunia yang terjadi, SDGs mencakup beberapa tujuan yang dalam hal ini ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi, diantaranya:

1) Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan lapangan pekerjaan yang tidak selaras dengan tingkat pertumbuhan penduduk dunia juga menjadi salah satu faktor hambatan dalam sector ekonomi. Goal ini bertujuan untuk menyokong pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja yang bisa memaksimalkan kemampuannya dan menjadi lebih produktif, serta juga lapangan pekerjaan yang layak bagi semua kelas dan kalangan. Yang menjadi target capaian dari tujuan ini ialah secara substansial dapat mengurangi pengangguran di usia muda, tidak berpendidikan dan juga tidak terlatih pada tahun 2020.

2) Infrastruktur, industri dan inovasi

Perkembangan dan kemajuan teknologi sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan dalam sektor industri dan infrastruktur, untuk itu perlu dikembangkan segala macam bentuk inovasi yang berguna bagi keberlangsungan dan perkembangan kedua sector tersebut. Dalam hal ini, SDGs dengan tujuannya ini mencoba untuk infrastruktur yang dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama, mendukung kanal

industrialisasi agar dapat terus tumbuh secara inklusif dan juga berkelanjutan, serta pula dapat meningkatkan jumlah dan skala riset, tenaga pembangunan per 1 juta orang dalam sector public maupun swasta secara substantif.

3) Mengurangi ketimpangan

Pertumbuhan ekonomi dunia yang tidak merata, tidak hanya antar negara, namun

hal tersebut sampai kepada skala kelompok hingga individu. Pertumbuhan ekonomi yang demikian kemudian secara terstruktur menciptakan kelas-kelas sosial yang kemudian mengklasterkan individu dan kelompok kedalam level dan strata yang berbeda. Hal ini membuat timbulnya ketimpangan ekonomi antar kelompok maupun kelas masyarakat satu dengan yang lain. Tujuan ini mencoba untuk mengurangi ketimpangan yang terjadi baik di dalam suatu negara maupun yang terjadi negara antar negara. Target yang ingin dicapai dari tujuan ini ialah memberdayakan dan juga mendorong penyeteraan sosial, ekonomi dan politik bagi seluruh masyarakat, memberikan hak dan pelayanan yang sama dengan tanpa melihat ras, etnis dan agama, kelas ekonomi, keadaan fisik, dan lainnya.

4) Konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab

Tujuan ini dibuat untuk memastikan pola konsumsi dan produksi yang bersifat berkelanjutan. Konsumsi dan produksi yang bersifat berkelanjutan ini diartikan sebagai siklus yang terus saling berintegrasi baik mulai dari sistem produksinya agar tidak menimbulkan limbah yang berbahaya bagi lingkungan hingga konsumsi yang berkecukupan dan tidak berlebihan agar tetap sesuai dengan kebutuhan dan menciptakan siklus yang dapat didaur ulang. Program ini memiliki target untuk mengurangi tingkat produksi limbah sisa produksi dan konsumsi secara substansial dengan tindakan pencegahan (*prevention*), pengurangan (*reduce*), penggunaan kembali (*reuse*), dan juga daur ulang (*recycle*).

5) Kemitraan untuk mencapai tujuan

Berasal dari kata “mitra”, secara harfiah kemitraan diartikan sebagai teman ataupun pasangan kerja, atau juga rekan dalam sebuah jalinan kerjasama dan sebagainya (Setiawan E. , 2019). Dalam hal ini, agenda SDGs turut mempertimbangkan untuk menjalankan kemitraan dalam mencapai tujuan-tujuannya. Hal ini bertujuan untuk memperkuat pengimplementasian dan juga merevitalisasi kemitraan global dalam pembangunan berkelanjutan. Tujuan ini menargetkan setiap negara agar dapat saling bekerja sama untuk saling bantu-membantu satu sama lain dalam mewujudkan SDGs secara global.

b. Komunitas Sosial (Society)

John J. Macionis dalam bukunya yang berjudul “Society: The Basic” edisi ke-enam, bahwa eksistensi dari setiap kelompok masyarakat secara jelas bersifat tidak sama rata atau terklaster ke dalam kelas-kelas sosial. Sebagian orang memiliki lebih banyak uang, pendidikan yang baik, kesehatan yang terjamin mutunya, dan juga kekuasaan sementara di lain sisi, banyak yang tidak memiliki *privillage* seperti yang sudah disebutkan. Dalam hal ini, lalu muncul sebuah konsep “*Social Stratification*” atau dapat diartikan sebagai stratifikasi sosial yang mana mengurutkan kelompok masyarakat ke dalam kategori kelas-kelas sosial yang menimbulkan kesenjangan di antaranya (Macionis, 2002). Kesenjangan yang terjadi harus diselesaikan dengan solusi bersama untuk meningkatkan taraf kelayakan hidup sosial masyarakat kelas bawah, SDGs dalam permasalahan ini memberikan solusi dengan beberapa program pembangunan berkelanjutan, diantaranya:

1) Menghapus kemiskinan

Kemiskinan masih terus menjerat masyarakat ke dalam kesulitan di hampir seluruh kehidupan jutaan populasi manusia di dunia. Suatu pendekatan mengatakan bahwa tanggung jawab atas kemiskinan ialah mutlak tanggung jawab dari orang itu sendiri (Macionis, 2002). SDGs menargetkan tidak adanya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan daya beli ataupun belanja kebutuhan kurang dari \$1.25

atau sekitar Rp. 18000 per harinya. Target lainnya ialah menghapus setengah dari jumlah penduduk miskin baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak hingga segala usia berdasarkan definisi secara nasional.

2) Menghapus kelaparan

Kelaparan juga masih merupakan salah satu dampak dari kemiskinan yang terjadi di lingkungan sosial. Kelaparan masih menjadi sebuah isu permasalahan yang dampaknya bisa membahayakan bagi kesejahteraan kehidupan manusia. SDGs mengatur program yang juga berupaya untuk mengakhiri isu tersebut, dapat mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas gizi serta mendukung sector pertanian berkelanjutan. Dalam hal ini pula, SDGs menargetkan untuk seluruh masyarakat dapat mencapai dan memperoleh akses terhadap pangan yang aman dan juga bernutrisi baik. Memelihara keanekaragaman genetika benih juga menjadi salah satu target dalam program ini.

3) Kesehatan yang baik dan kesejahteraan

Seperti yang telah dijelaskan di awal, bahwa jaminan kesehatan dan juga kesejahteraan masih mengalami ketimpangan pada setiap lapisan kelompok masyarakat dimana sebagian kelompok mendapatkan *privillage* atasnya, namun tidak dengan sebagian lainnya. SDGs berupaya untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat hidup dengan kesehatan yang layak serta kesejahteraan yang berkecukupan bagi semua lapisan masyarakat di segala usia. Beberapa target yang ingin dicapai ialah menekan angka kematian pada bayi usia baru lahir dan ibu melahirkan, menghapus epidemic pada penderita AIDS dan juga penyakit menular lainnya, dan yang tidak kalah penting ialah menekan angka peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang.

4) Pendidikan bermutu

Keterbatasan fasilitas dalam menyampaikan sebuah ajaran di dalam dunia pendidikan masih banyak terjadi di

seluruh dunia. Fasilitas yang dimaksud berupa segala macam sarana dan prasarana pendukung dalam pengajaran, mulai dari infrastruktur bangunan sekolah, ketersediaan SDM pengajar yang berkompentensi, hingga masalah aspek geografis yang turut sering menghambat proses pembelajaran di dunia pendidikan. Program ini bertujuan untuk memastikan pendidikan yang inklusif dan juga setara dalam artian menjamin bagi semua individu untuk mendapatkan hak dan kesempatan belajar bagi semua. Program ini menargetkan seluruh remaja dan juga sebagian usia dewasa untuk memiliki kemampuan baca dan tulis serta kemampuan berhitung pada tahun 2030.

5) Kesetaraan gender

Disparitas lintas gender juga turut mewarnai ketimpangan yang terjadi di lingkungan masyarakat dunia. Perbedaan biologis membagi populasi manusia menjadi 2 kategori yaitu perempuan dan laki-laki. Gender lebih mengarah ke dalam sifat yang ada pada ranah pribadi dan juga posisi sosial yang dilebeli oleh komunitas sosial tentang bagaimana menjadi seorang perempuan ataupun laki-laki. Gender dibentuk oleh sosial untuk bagaimana kita berinteraksi dengan yang lain atau bahkan sampai kepada bagaimana kita berfikir tentang diri kita sendiri. Lebih penting dari itu semua, gender juga berarti hirarki, menempatkan perempuan dan laki-laki ke dalam posisi yang berbeda dalam kondisi *power* atau kemampuan dan kekuatan, kemakmuran, dan sumber daya yang lainnya (Macionis, 2002). Kontribusi dari perbedaan posisi yang dibangun oleh sosial inilah kemudian rentan menjadi tidak adil dan setara, baik kesempatan dan posisi yang diterima oleh keduanya. Dalam hal ini, banyak aspek sosial yang kemudian menempatkan perempuan sebagai kelas yang lebih rendah daripada laki-laki yang dikenal dengan sifat patriarkis yang melekat dan lain sebagainya (ferree & Hall, 1996 dalam Macionis, 2002). Program SDGs ini bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender dengan memberdayakan perempuan dan anak-anak. Program ini menargetkan untuk

mengakhiri diskriminasi sosial terhadap semua perempuan dan anak-anak di seluruh dunia.

6) Kota dan komunitas yang berkelanjutan

Nirwono Jogo seorang koordinator kemitraan kota hijau mengatakan, kota harus diartikan sebagai aglomerasi atau wilayah dengan kumpulan dari beberapa elemen, serta superposisi dari berbagai macam unit tata ruang dengan tingkatan dan juga besaran yang berbeda-beda. Dalam hal ini pula meningkatnya taraf perkonomian kota, maka kebutuhan akan pelayanan dan kualitas hunian dan wilayah juga meningkat. Keseimbangan penggunaan lahan dan juga mengatur segala aspek pembangunan sesuai fungsi harus dilakukan untuk mengantisipasi kebutuhan komunitas di dalamnya yang memiliki kepentingan beragam (Joga, 2019). Program ini mencoba untuk membangun pemukiman kota yang inklusif, aman, tahan lama dan juga berkelanjutan. Dengan menargetkan penyediaan akses yang universal terhadap ruang publik yang aman, hijau, dan juga mudah diakses terutama bagi perempuan, anak-anak dan juga lansia.

7) Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat

Program ini bertujuan untuk mendukung masyarakat yang rukun dan damai serta inklusif bagi pembangunan berkelanjutan. Menyediakan akses yang mudah bagi keadilan untuk semua elemen masyarakat, dimana masih banyak keadilan yang tidak didapatkan oleh banyak orang di dunia. Membangun kelembagaan yang kuat dengan institusi-institusi yang bersifat efektif, inklusif, serta akuntabel di semua level kalangan masyarakat. SDGs menargetkan untuk mengurangi angka kasus korupsi dan suap dalam bentuk apapun di seluruh instansi baik nasional ataupun swasta.

c. Lingkungan dan makhluk hidup (*Biosphere*)

Biosphere diartikan sebagai bagian dari bumi yang diperuntukkan untuk tempat tinggal makhluk hidup. Mencakup dari akar terbawah pepohonan hingga wilayah tergelap di bawah laut (National Geographic Society, 2011).

Over populasi menyebabkan serangkaian masalah bagi lingkungan dan makhluk hidup lainnya, untuk itu agar dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan, dibutuhkan langkah-langkah konkrit untuk memelihara dan memberdayakan lingkungan dan juga makhluk hidup yang ada di bumi. SDGs dengan programnya mencoba untuk mewujudkan hal tersebut dengan program tujuan, diantaranya:

1) Akses air bersih dan sanitasi

Permasalahan sulitnya akses air bersih dan sanitasi yang aman dan ramah lingkungan terus mengancam bagi kehidupan manusia terutama anak-anak di seluruh dunia. Sanitasi dan air bersih sudah seharusnya menjadi kebutuhan pokok manusia yaitu berupa air minum. *Hygiene* dan sanitasi, kualitas air, dan pengelolaan sumber air (Kumparan, 2018). Program ini mencoba untuk memastikan ketersediaan air bersih yang cukup serta menyediakan system manajemen air bersih dan sanitasi yang baik dan berkelanjutan. Dengan menargetkan tersedianya akses sanitasi yang layak dan mengakhiri kebiasaan buang air di tempat terbuka dengan memperhatikan mereka yang berada di dalam situasi rentan seperti anak-anak dan lansia.

2) Penanganan perubahan iklim

Perubahan iklim akibat dari kerusakan lingkungan yang sejalan dengan meningkatnya polusi dan industry yang tidak ramah lingkungan membuat pergantian iklim dan cuaca yang cukup ekstrim. Permasalahan ini dapat berdampak kepada aktivitas dan keseimbangan alam dan manusia, maka dari itu langkah nyata dan kongkrit dibutuhkan untuk segera menangani permasalahan tersebut. SDGs hadir untuk membantu menangani perubahan iklim yang terjadi sampai kepada dampaknya. Salah satu programnya ialah dengan memperkuat tingkat adaptasi manusia sebagai penduduk di seluruh dunia terhadap perubahan iklim dan bahaya yang dapat ditimbulkan serta bencana alam (Dinda, 2018).

3) Menjaga ekosistem laut

Laut menjadi salah satu aspek terbesar dari segi luas wilayah yang ada di bumi. 71% luas bumi dipenuhi oleh wilayah lautan dan samudra yang kemudian membuatnya juga menjadi penting bagi kehidupan manusia (Kumparan, 2018). Laut memiliki ekosistem makhluk hidup yang juga menjadi salah satu sumber kehidupan bagi umat manusia. SDGs dengan programnya ini berupaya untuk mengkonservasi serta memanfaatkan sumber daya laut secara efektif demi keberlangsungan ekosistem dan juga pembangunan yang berkelanjutan. Menargetkan pada tahun 2020 agar masing-masing negara memiliki aturan dan regulasi yang baik untuk mengatur secara efektif atas masalah pengambilan ikan secara berlebihan, pemancingan ikan secara ilegal, dan juga teknik-teknik pemancingan yang destruktif (Dinda, 2018).

4) Menjaga ekosistem darat

Sama pentingnya dengan ekosistem laut, ekosistem darat juga harus diberdayakan dan dilindungi. Daratan merupakan bagian dari bumi yang dijadikan sebagai tempat bagi manusia dan berbagai macam makhluk hidup lainnya hidup dan beraktivitas. SDGs juga hadir untuk melindungi serta memulihkan dan juga pemanfaatan ekosistem daratan dengan cara mengelola hutan secara efektif, menekan angka desertifikasi (penggurunan), dan juga menghambat punah dan hilangnya keanekaragaman hayati di bumi. Menargetkan untuk masing-masing negara memiliki regulasi dan aturan untuk pembalakan hutan liar, perburuan satwa dan hewan langka guna melestarikan dan melindungi flora dan fauna dengan spesies langka yang terancam punah (Dinda, 2018).

2. Aktor dan Stakeholders

Dengan tersusunnya struktur dan sasaran SDGs yang ditargetkan hingga tahun 2030 mendatang, dunia masih perlu mendorong keseriusannya dalam mewujudkan agenda tersebut mengingat pendahulunya yaitu MDGs masih belum banyak

tercapai sarasannya. Sesuai dengan uraian 17 sasaran umum dari agenda SDGs itu sendiri, diperlukan sinergi kerjasama yang apik oleh seluruh elemen dan aktor yang bertanggung jawab untuk mewujudkannya. PBB mengelompokkan *stakeholders* yang harus turut berperan aktif di dalam perwujudan agenda SDGs kedalam beberapa kategori yang disebut sebagai *Major Groups and other Stakeholders* (MGoS), kelompok aktor ini diadopsi untuk memberikan sumbangsi nyata terhadap agenda yangtelah disusun ini. Sejak diadopsi, MGoS telah memberikan kontribusi yang baik dengan secara aktif bekerja guna mencapai implementasi fungsinya. Banyak yang telah dilakukan, seperti melalui proyek, kerjasama inisiatif, advokasi, berbagi ilmu pengetahuan, dan juga memantau perkembangan agenda SDGs (United Nations, 2016). Para aktor *Major Groups and other Stakeholders* (MGoS) dikelompokkan ke dalam 13 kategori, yaitu:

- 1) Bisnis dan industri

Kelompok yang terdiri dari para pengusaha dan industriawan ini meyakini bahwa implementasi pembangunan berkelanjutan akan tergantung pada keterlibatan aktif sektor publik dan swasta. Partisipasi aktif sektor swasta dapat berkontribusi pada pencapaian pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui alat penting dari kemitraan publik dan swasta (United Nations, 2016).

Mereka juga berpendapat tentang betapa pentingnya pelaporan keberlanjutan perusahaan dan berinisiatif dengan mendorong perusahaan terutama perusahaan besar dan publik, untuk mengintegrasikan informasi pembangunan berkelanjutan ke dalam siklus pelaporan mereka. Mereka juga mendorong industri, pemerintah terkait, dan pemangku kepentingan lainnya dengan dukungan sistem PBB untuk mengembangkan model praktik terbaik untuk pembangunan berkelanjutan dan juga memfasilitasi tindakan untuk integrasi pelaporan keberlanjutan. Dengan mempertimbangkan pengalaman dari kerangka kerja yang sudah ada dan memberikan perhatian khusus kepada kebutuhan negara-

negara berkembang, termasuk untuk pengembangan kapasitas negara (United Nations, 2016).

2) Anak dan remaja

Persatuan anak dan remaja ini atau juga disebut dengan *United Nations Major Group for Children and Youth* (MGCY) beranggotakan orang dari seluruh dunia yang memiliki usia di bawah 30 tahun. Mereka merupakan jaringan internasional pemuda dan organisasi yang dinamis yang mencoba untuk membawa perubahan nyata di dunia. MGCY juga bekerja untuk menginspirasi dan menjadi platform bagi anak-anak dan remaja untuk menjadi aktivis muda melalui serangkaian kelompok kerja, yang bertujuan menyatukan orang-orang untuk membantu membangun suara pemuda global. Fungsinya juga mencakup pengembangan kapasitas dan pemberdayaan kaum muda. Secara formal, ia memiliki peran seperti kelompok kerja lainnya tentang SDGs dan negosiasi tentang pembiayaan untuk pembangunan berkelanjutan, pengurangan resiko bencana, negara-negara berkembang dengan pulau kecil, konsumsi berkelanjutan dan pola produksi, serta proses-proses lain yang diadakan di PBB tentang masalah-masalah pembangunan (United Nations, 2016).

3) Petani

Major Group dari kelompok tani ini dibentuk untuk menyediakan ruang inklusif bagi semua petani dari seluruh dunia untuk mengoordinasikan posisi, pernyataan dan partisipasi keikutsertaannya dalam agenda PBB terkait dengan pembangunan berkelanjutan. Mitra penyelenggara kelompok petani ini adalah Organisasi Petani Dunia dan *IFOAM-Organics International*, yang secara bersama-sama bekerja untuk melaksanakan semua tanggung jawab. Kelompok petani berupaya memprioritaskan partisipasi petani, penggembala dan nelayan yang berasal dari *Global South* dan negara-negara berkembang. Petani merupakan kelompok yang menghasilkan makanan dan produk pertanian yang dikonsumsi oleh dunia, dan juga memberikan kontribusi pada sektor ekonomi, sosial dan budaya yang signifikan di tingkat lokal, regional dan

global. Dengan demikian, anggota kelompok petani harus secara aktif terlibat dalam sistem PBB untuk memastikan bahwa suara mereka juga didengar dan dihormati (United Nations, 2016).

4) *Indigenous People*

Diperkirakan ada sekitar 370 juta penduduk asli di dunia, dengan 5.000 kelompok berbeda, di 90 negara di seluruh dunia. *Indigenous People* atau yang lebih dikenal dengan masyarakat adat ditemukan di setiap wilayah di dunia, tetapi sekitar 70% dari mereka tinggal di wilayah benua Asia. Penduduk asli atau masyarakat adat merupakan 5% dari bagian populasi dunia, namun menyumbang sekitar 15% populasi dari penduduk miskin dunia. Contoh-contoh masyarakat adat termasuk Inuit di Arktik, penduduk asli Amerika, pemburu-pengepul di Amazon, penggembala tradisional seperti suku Maasai di Afrika Timur, dan masyarakat suku di Filipina (United Nations, 2016).

The Indigenous Peoples Major Group (IPMG) menjadikan mitra Organizing Partners (OPs) untuk melayani dan menjadi fasilitator dalam agenda pembangunan berkelanjutan. Dalam struktur kerja saat ini, ada dua mitra penyelenggara global yaitu Tebtebba (Pusat internasional masyarakat adat untuk kebijakan penelitian dan pendidikan) dan IITC (*International Indian Treaty Council*). IPMG juga mencakup titik fokus mitra organisasi regional (United Nations, 2016).

5) Otoritas lokal

The Local Authorities Major Group (LAMG) menyatukan jaringan dari organisasi internasional yang mewakili pemerintah lokal dan subnasional dari semua benua di dunia. Tren urbanisasi yang berkembang, serta tingkat konsumsi sumber daya di daerah perkotaan, menegaskan kota menjadi ruang utama untuk mengatasi hambatan dan mengeksplorasi peluang kebijakan yang efektif untuk pembangunan berkelanjutan. Selain itu, pemerintah daerah dan subnasional memiliki kompetensi yang eksklusif dalam berbagai bidang seperti mitigasi dan adaptasi terhadap

perubahan iklim, energi, pengelolaan limbah, pertanian, industri, pendidikan, transportasi, penggunaan dan perencanaan lahan, produksi dan keamanan pangan, transportasi, air dan sanitasi, serta perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati. Pemerintah daerah dan subnasional memiliki peran dan kontribusi unik untuk dimainkan dalam kemajuan dan implementasi perjanjian global dan undang-undang, kebijakan, strategi, standar, program, dan tindakan pembangunan berkelanjutan. Peran pemerintah daerah dan subnasional sebagai *Governmental Stakeholders* dalam pembangunan berkelanjutan diakui melalui sejumlah proses dan dokumen pemerintahan (United Nations, 2016).

6) Organisasi non-pemerintahan (NGOs)

NGOs bertugas untuk memfasilitasi keikutsertaan dan meningkatkan keterlibatan organisasi non-pemerintah dalam proses yang secara langsung dan tidak langsung terkait dengan Forum *High-level Politic*. Mereka juga bekerja untuk mengatur posisi atas nama anggota yang akan dikirim di berbagai ruang pertemuan PBB. Karena keragaman suara dan perspektif dalam kelompok ini, NGOs diorganisir di sekitar kelompok tematis yang bertindak sebagai pusat ahli pada berbagai masalah ataupun dalam agenda SDGs (United Nations, 2016).

7) Komunitas ilmunan dan teknologi

The Scientific and Technological (STC) Major Group menyediakan pemerintah, pembuat kebijakan dan Masyarakat pemahaman tentang batasan dan parameter yang diberlakukan oleh hukum alam dan menunjukkan apa yang dapat dicapai secara ilmiah dan teknologi berdasarkan pada apa yang telah diketahui sekarang dan pada apa yang dapat dilakukan dengan alat pengetahuan dan teknologi yang telah dimiliki, termasuk yang sedang dikembangkan dengan potensi keberhasilan. Kemajuan dalam semua bidang berkontribusi dalam perdebatan pembangunan berkelanjutan yang membutuhkan kemajuan inovatif substansial dalam sains dan teknologi dan analisis menyeluruh dari kelayakan solusi yang diusulkan.

Dengan demikian, dengan bertukar dan menerapkan pengetahuan ilmiah, kreativitas dan praktik rekayasa, dan teknologi terkini, *STC Major Group* mampu secara substansial dapat memperkenalkan solusi berkelanjutan yang layak di bidang kegiatan yang berpotensi untuk dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dunia (United Nations, 2016).

8) Perempuan

The Women's Major Group (WMG) dibentuk pada *Earth Summit* 1992 di Rio de Janeiro, Brasil, di mana pemerintah mengakui perempuan sebagai salah satu dari sembilan kelompok penting dalam masyarakat untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. WMG adalah peserta resmi dalam proses PBB tentang pembangunan berkelanjutan. WMG aktif dalam proses program lingkungan PBB sejak tahun 1996. Kelompok perempuan ini memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat sipil perempuan, dengan berbagi informasi dan masukan ke dalam ruang kebijakan yang disediakan oleh PBB seperti partisipasi untuk berbicara dan menyuarakan suaranya, pengajuan proposal, akses ke dokumen-dokumen, dan juga sesi pengembangan (United Nations, 2016).

9) Persatuan pekerja dan pedagang

Serikat pekerja dan pedagang mewakili suara dan minat ratusan juta pekerja dan pedagang dari seluruh dunia. Kelompok ini menyatukan beberapa jenis organisasi pekerja yang berbeda dari pusat serikat pekerja nasional, ke organisasi serikat pekerja regional, hingga federasi serikat pekerja global dan organisasi pendukung serikat solidaritas pekerja. Kelompok ini juga membela kepentingan pekerja, terlepas dari apakah mereka milik gerakan serikat, dipekerjakan di sektor formal, atau bekerja di ekonomi informal. Mereka bertekad berorganisasi untuk bisa membela hak asasi manusia dan standar perburuhan di mana-mana, dan untuk mempromosikan pertumbuhan serikat pekerja untuk kepentingan semua pekerja dan keluarga mereka. Mereka juga mencoba mengatasi kemiskinan dan ketidaksetaraan melalui keadilan sosial. Kelompok buruh dan pedagang mempromosikan cita-cita dan

prinsip-prinsip serikat pekerja. Oleh karena itu mereka sangat berkomitmen untuk mempromosikan keseimbangan gender dalam delegasinya, serta untuk mendorong keterlibatan para pemimpin serikat pekerja muda (United Nations, 2016).

10) Orang dengan disabilitas

Kelompok pemangku kepentingan penyandang disabilitas merupakan fokus dari program UNDESA, ECOSOC dan GA untuk semua kebijakan pembangunan berkelanjutan PBB. Tanggung jawab kelompok pemangku kepentingan penyandang disabilitas meliputi SDGs, forum *High-level Politic*, pembiayaan untuk pembangunan berkelanjutan, pada proses kebijakan global dan regional PBB. Selain itu, kelompok pemangku kepentingan penyandang disabilitas untuk Pembangunan Berkelanjutan bertujuan untuk bekerja sama erat dengan konstituensi lain yang terkait dengan proses kebijakan PBB lainnya. Kelompok pemangku kepentingan penyandang disabilitas adalah kelompok pemangku kepentingan lain yang diakui dalam PBB dan sebagai bagian dari *Major Group* dan mekanisme koordinasi pemangku kepentingan lainnya (United Nations, 2016).

11) Relawan

Volunteerism dapat membantu memperluas dan memobilisasi konstituensi dan untuk melibatkan orang-orang dalam perencanaan dan implementasi nasional dari agenda SDGs. Kelompok relawan dapat membantu melokalkan agenda baru dengan menyediakan area interaksi baru antara pemerintah dan orang-orang untuk tindakan nyata dan terukur. *The Volunteer Groups Alliance (VGA)* adalah koalisi global yang menyatukan organisasi dan jaringan yang bekerja di lebih dari 150 negara yang berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan melalui *volunteerism* dalam segala bentuknya. Kelompok ini bertujuan untuk mempromosikan dan menyoroti kontribusi relawan dalam mempromosikan SDGs, menghubungkan organisasi yang bekerja dengan Kelompok Relawan di seluruh dunia untuk membantu memperkuat dampak kolektif sukarelawan dalam proses tindak lanjut dan peninjauan SDGs di skala nasional,

regional hingga global, serta mendapatkan pengakuan atas peran penting relawan dalam keberhasilan memantau dan mencapai SDGs (United Nations, 2016).

12) Grup *ageing*

The Stakeholder Group on Ageing (SGA) memfasilitasi partisipasi efektif anggotanya dalam hal-hal yang terkait dengan implementasi agenda pembangunan 2030, termasuk partisipasi dalam forum *High-level Politic* dan badan antar pemerintah lainnya. Tujuan SGA adalah untuk membuat masalah penuaan terlihat dalam proses implementasi, tindak lanjut dan peninjauan Agenda 2030 di tingkat nasional, regional dan global (United Nations, 2016).

13) Pelajar dan akademisi

The Education and Academia Stakeholder Group (EASG) menyatukan organisasi pendidikan masyarakat sipil berbasis hak asasi manusia serta organisasi akademis dan jaringan yang bekerja pada hak atas pendidikan, yang mengatur diri sendiri untuk terlibat dengan pemantauan dan peninjauan agenda SDGs. EASG terbuka untuk semua organisasi yang bekerja untuk merealisasikan sepenuhnya hak atas pendidikan gratis yang inklusif dan berkualitas bagi semua, implementasi Agenda 2030, dan agenda SDGs khususnya (United Nations, 2016).

Di luar 13 kelompok *stakeholders* tersebut, para aktor dan pemangku kepentingan lainnya juga aktif dalam proses tindak lanjut dan peninjauan tahunan agenda SDGs, hingga pada puncaknya pada Forum *High-level Politic* tahunan untuk pembangunan berkelanjutan. MGoS yang tertarik untuk terlibat dalam Forum *High-level Politic* dapat mendaftar untuk bergabung dengan para aktor yang dikelola langsung oleh PBB dan mekanisme yang dilakukan untuk mengkoordinasikan Forum *High-level Politic* Stakeholder lainnya (MGoS HLPF CM) dengan mengisi formulir pendaftaran yang ada. SDGs juga mendorong MGoS untuk menjangkau mitra penyelenggara dari konstituen mereka yang relevan untuk mengetahui lebih lanjut tentang peluang dalam keterlibatan (United Nations, 2016).

B. Komitmen Pemerintah dalam program SDGs di Indonesia

Dalam Sidang Umum PBB pada September 2015, Wakil Presiden Jusuf Kalla menjadi representatif Indonesia untuk turut menyepakati sebuah agenda pembangunan universal yang baru menggantikan Tujuan Pembangunan Millennium (MDGs) yang berlaku sejak tahun 2000 sampai 2015. Draft pembangunan ini tertuang di dalam sebuah dokumen yang berjudul “*Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development*” berisi 17 Tujuan dengan 73 indikator utama dan 62 indikator tambahan yang berlaku mulai tahun 2016 hingga tahun 2030 (Zaki, 2016). Indikator tersebut merupakan indikator yang dimiliki dan tersedia di Indonesia berdasarkan proses penyamaan antara ketersediaan dengan usulan indikator SDSN. Alasan kenapa jumlah indikator berkurang dari apa yang telah disediakan oleh SDSN ialah dikarenakan beberapa faktor diantara ketidakterseediaanya indikator, indikator global/internasional, adanya indikator untuk lembaga tertentu, indikator untuk negara maju, dan juga negara maju (Developed Country) dan untuk sebuah negara berpendapatan tinggi (High Income Country) (Agus Sutopo, 2014).

Aktifnya pemerintah Indonesia dalam program SDGs dengan terus membuka ruang yang telah tersedia dalam proses dan perwujudan SDGs turut mendorong *stakeholder* lain untuk dapat turut aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan program tersebut. Di Indonesia sendiri tidak hanya pemerintah, para *stakeholder* lainnya seperti sektor swasta dan bisnis serta kalangan akademisi juga telah turun aktif menyerukan program tersebut seperti menemui beberapa aktor penting yang ada di kursi pemerintahan untuk terus mendorong isu SDGs agar bisa menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional hingga terpenuhinya 17 sasaran umum dengan 169 sasaran yang telah termaktub dalam program SDGs global. Desember 2015, Kelompok *Civil Society Organizations* (CSO) atau yang lebih dikenal sebagai Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk SDGs menemui Presiden

Joko Widodo dalam rangka berkaitan dengan pengimplementasian program SDGs di Indonesia, gerakan sosial ini melayangkan beberapa tuntutan berupa:

- 1) Mendesak pemerintah agar segera membentuk payung hukum dalam pelaksanaan program SDGs;
- 2) Mendesak pemerintah agar segera menyusun Rencana Aksi Nasional dalam pelaksanaan program SDGs;
- 3) Mendesak pemerintah agar segera membentuk sebuah panitia bersama dalam pelaksanaan program SDGs (Fitri, 2016).

Pada penghujung tahun 2015, Sidang kabinet yang dilaksanakan menghasilkan beberapa keputusan, beberapa diantaranya ialah Presiden menitahkan menteri-nya untuk sesegera mungkin merumuskan draft dokumen kerangka hukum terhadap pelaksanaan program SDGs dalam wujud Peraturan Presiden. Perintah ini dibebankan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional bekerjasama dengan Kepala Kantor Staff Presiden (Fitri, 2016).

Mulai disusun sejak awal tahun 2016, proses penyusunan kerangka hukum untuk SDGs ini dilakukan dengan membuka panel partisipasi masyarakat melalui media diskusi yang diamanatkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Ditetapkan sejak 4 Juli 2017, Peraturan Presiden (PERPRES) no. 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian SDGs memuat dan menetapkan beberapa aktor terkait yang wajib berperan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, beberapa diantaranya ialah:

- 1) Pemerintah Pusat yaitu Presiden Republik Indonesia dibantu oleh Wakil Presiden dan kabinet kerja para menteri sebagaimana yang dimaksud di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Organisasi Kemasyarakatan atau yang lebih dikenal sebagai ORMAS merupakan organisasi yang didirikan atas bentuk sukarela dari masyarakat yang didasari oleh kesamaan aspirasi dan tujuan dalam pencapaian tujuan NKRI sesuai dengan Pancasila;

- 3) Filantropi yang diartikan sebagai pihak yang memberi dukungan dan juga sumber daya secara sukarela terhadap sesama yang bertujuan untuk dapat mengatasi masalah kemanusiaan yang muncul di lingkungan sosial dan juga untuk memajukan kepentingan umum yang berkelanjutan;
- 4) Pelaku Usaha merupakan perseorangan ataupun sebuah badan usaha baik yang memiliki badan hukum ataupun tidak, didirikan dan juga berkedudukan ataupun disebut melakukan kegiatan yang berwilayah di dalam wilayah hukum NKRI, melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai aspek ekonomi (Indonesia, 2017).

Selain mengatur peran setiap Kementerian dan Lembaga dalam pelaksanaan SDGs, di luar dari muatan tentang strategi dan juga kerja yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam proses pencapaian SDGs, PERPRES ini juga mengatur peran masing-masing stakeholder non-pemerintah yang juga harus terlibat dalam pelaksanaan program SDGs, seperti contohnya: akademisi, kelompok masyarakat sipil, filantropi, dan juga pelaku usaha.

C. Perkembangan Unilever Sebagai *Multinational Corporation*

Pertama kali istilah dari *Multinational Corporations* muncul pada tahun 1960. Saat membedakan antara portofolio dan investasi langsung, istilah pertama yang digunakan ialah “sebagian perusahaan...” dalam artian perusahaan-perusahaan tersebut memiliki satu negara sebagai *central* ataupun kapital mereka (*Home Country*) tetapi dalam waktu yang bersamaan juga beroperasi dan tinggal di bawah hukum negara-negara lain (*Host Country*) (Gafaru, 2006).

Dalam beberapa dekade terakhir, fungsi dari MNCs dalam pembangunan berkelanjutan menjadi perdebatan yang sangat kontroversial di dunia pendidikan. Yang menjadi topic utamanya ialah tentang dampak kehadirannya terhadap lingkungan, apakah MNCs berdampak baik dalam realisasi lingkungan yang berkelanjutan bagi negara-negara

berkembang. Dilihat dari asumsi tersebut, paham *neo-liberal economist* percaya bahwa MNCs mungkin menjadi katalis yang signifikan untuk pembangunan berkelanjutan, karena MNCs memiliki tipe yang lebih baru dengan teknologi yang bersih dan juga memiliki praktik manajemen yang lebih baik yang berarti dapat diterapkan kepada anak perusahaan mereka di negara-negara berkembang (Ibid).

Unilever didirikan oleh Laver Brothers pada tanggal 9 September 1929 dengan menandatangani kesepakatan bersama sebuah perusahaan Margarine Unie (Unilever Indonesia, 2019). Sebelumnya, Secara singkat mari kita lihat bagaimana sejarah dan struktur Unilever berkembang yang dapat memberikan gambaran bagaimana sebuah MNCs berjalan. Akar di mana awal mula perusahaan ini berdiri dapat dilihat kembali dari perusahaan penghasil sabun, Inggris, yang bernama Lever Brothers yang didirikan pada tahun 1880-an. Menjadi penghasil sabun terbesar di Inggris pada beberapa tahun, *Co-Founder* William Lever tidak ragu untuk memperluas pangsa pasar perusahaan, mulai dari Eropa hingga Amerika. Untuk memastikan ketersediaan bahan mentah, Lever Brothers membeli perkebunan kelapa sawit di pulau Salomon pada 1905 dan juga beberapa perusahaan perdagangan Afrika pada beberapa tahun setelahnya. Dalam rangka untuk menentukan harga pada pasar sabun, perusahaan melihat dan mempertimbangkan dari bagaimana kegagalan beberapa perusahaan pesaing di dalam pangsa pasar yang sama. Tahun 1921, Lever Brothers berhasil menjual lebih dari 70 persen produksi sabunya. Mereka memulai memproduksi margarine pada 1914 atas permintaan pemerintah Inggris yang fokus terhadap solusi kekurangan bahan pangan akibat dari Perang Dunia pertama (Chandler, 2005).

Atas inisiasi tersebut, Laver Brothers kemudian merger dengan perusahaan margarine asal Belanda pada tahun 1929. Hal ini menjadikannya merger perusahaan terbesar sampai sepanjang Perang Dunia kedua. Dengan sebuah aturan yang kompleks, keduanya sepakat untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Saat ini, Unilever diatur oleh Unilever Ltd sebuah

perusahaan Inggris dan juga Unilever NV, sebuah perusahaan asal Belanda. Kedua sutrukturasi dua negara tersebut menerapkan pajak dan pandangan politik tertentu terhadap perusahaan dalam beberapa tahun. Setelah berakhirnya Perang Dunia kedua, Unilever memindahkan pangsa pasar mereka khususnya untuk produk-produk parfum, produk makanan, detergen, dan pasta gigi. Pada tahun 1980-an perusahaan berfokus pada memperluas keunggulan mereka di pasar Amerika Serikat dengan membeli franchise *Chesebrough-Pond* tahun 1986 dan beberapa nama pengharum seperti Feberge dan Calvin Klein (Ibid).

Sebagai sebuah perusahaan multinasional, Unilever memperbesar sepak terjang strategi bisnisnya dengan mengembangkan anak cabang perusahaan ke beberapa negara di dunia termasuk Indonesia. Unilever masuk ke Indonesia yang bertempat di daerah Angke, Jakarta Utara pada tanggal 5 Desember 1933 dengan nama “Lever’s Zeepfabrieken N.V.”. Kemudian pada tanggal 22 Juli 1980 perusahaan mengganti namanya menjadi “PT Unilever Indonesia” dengan akta No. 171 yang tercatat di notaris Ny. Kartini Muljadi SH. Pergantian nama juga kembali terjadi pada tanggal 30 Juni 1997, kali ini menjadi “PT Unilever Indonesia Tbk” dengan tercatat pada akta No. 92 notaris publik Mudofir Hadi SH (Unilever Indonesia, 2019).

D. Dampak kehadiran Unilever di Indonesia

Telah dipercaya bahwa perkembangan teknologi merupakan sebuah faktor penting di dalam melindungi lingkungan (Gafaru, 2006). Teknologi yang dibawa oleh sebuah MNCs dapat digunakan dalam mengelola dan meningkatkan kapasitas lingkungan, dan mungkin saja bisa menjadi sebuah kebenaran bahwa MNCs merupakan kunci dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, hal tersebut dikarenakan oleh mekanisme transisi teknologi yang terjadi antara MNCs dengan negara berkembang (Digdowiseiso, 2010).

Sejak tahun 1980-an, serangkaian bencana lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan MNCs jika dikaitkan dengan

pemahaman bahwa kelangsungan hidup umat manusia sangat tergantung pada fungsi lingkungan alam yang berkelanjutan (Disseindorf 2000 dalam Gafaru, 2006). Secara langsung menyoal MNCs, dalam moralitas, untuk turut mengerti dan memahami pentingnya keseimbangan antara menggunakan atau memanfaatkan lingkungan dengan menjaga dan mengelola lingkungan secara berkelanjutan. Pengelolaan dan pelestarian yang dilakukan bukan hanya semata untuk terus melanjutkan roda produksi agar terus berjalan, namun juga memperhitungkan kerugian atas kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh proses produksi yang berdampak terhadap entitas di luar sistem produksi, baik masyarakat, ataupun makhluk hidup lainnya.

Produktifitas Unilever dengan roda perindustriannya turut berdampak buruk terhadap lingkungan dan sosial di Indonesia, total 9 pabrik dengan 3 pusat distribusi berdiri di Indonesia hingga saat ini. Dampak buruk yang ditemukan beberapa diantaranya ialah pembuangan Bahan Berbahaya dan Beracun atau yang dikenal dengan limbah B3 di sekitar kawasan perkebunan industri Sei Mangkei, Kec. Bosar Maligas Kab. Simalungun, Sumatera Utara. Salah satu pabrik industry milik Unilever yang berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus blok M.N.R.S Sei Mangkei diketahui membuang limbah industry B3 secara sembarangan yang meyebabkan matinya beberapa ekor ternak sapi milik warga sekitar wilayah tersebut. Limbah B3 yang dibuang diduga berjenis soda api Natrium Hidroksida (NaOH) yang memiliki sifat korosif terhadap benda lain yang jika terpapar ke kulit tubuh manusia akan terasa panas dan juga perih (Efrijal, 2018). Kejadian lainnya ditemukan di dekat lokasi wilayah yang sama di mana terlihat genangan air yang membentuk seperti danau buatan diduga berasal dari pusat industri yang sama milik Unilever. Warga meyakini hal tersebut berasal dari pabrik yang dikelilingi oleh tembok setinggi 3 meter tersebut. Hingga kini, perusahaan berdalih bahwa genangan tersebut merupakan hasil dari curah hujan yang tidak memiliki saluran pengaliran, jika memang benar bahwa air tersebut berasal dari limbah industri,

maka dibutuhkan segenap tes dan uji laboratorium untuk membuktikannya (Ibid). Hal ini tentu akan mengancam keberadaan masyarakat di lingkungan sekitar wilayah industry tersebut. Bahkan tidak hanya itu, kerusakan lingkungan, matinya ternak warga, hingga ancaman terhadap keberadaan binatang dan tanaman liar yang berada di sekitarnya.

Aksi dan reaksi juga dilakukan oleh masyarakat akan berjalannya industri Unilever di Indonesia, salah satunya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh perkumpulan mahasiswa wilayah Tangerang Selatan yang tergabung dalam jaringan Indonesia muda di depan gedung PT. Unilever Indonesia. mereka menuntut pemerintah dan KLHK mencabut izin yang beroperasi di Wilayah BSD City Kabupaten Tangerang. Tuntan mereka terinisiasi atas kehadiran Unilever yang telah mengeksploitasi alam Indonesia dan juga sumber daya yang ada di dalamnya bahkan juga bertanggung jawab atas pencemaran lingkungan oleh sampah dan juga limbah industri. Jaringan Indonesia Muda ini juga mempertanyakan tentang komitmen Unilever untuk menyertakan label berlogo RSPO di setiap kemasan produknya. RSPO atau *Roundtable on Sustainable Palm Oil* merupakan sebuah logo dari sebuah *trademark* yang membuktikan bahwa produk tersebut mendukung dan mengimplementasikan standar prinsip kelapa sawit yang bersifat berkelanjutan sesuai standart RSPO. Ketiadaan logo RSPO menandakan bahwa PT Unilever Indonesia belum membeli CSPO yang berasal dari lokal Indonesia, maka dari itu, statemen Unilever sebagai pendiri RSPO dipertanyakan (Maarif, 2019).

Keseimbangan antara sistem produkti vitas industri Unilever yang bersinggungan dengan sosial dan lingkungan di wilayah Indonesia harus terjaga. Secara garis besar, hubungan kebergantungan Unilever atas SDM dan SDA yang diperukan dalam sistem produksinya yang telah disediakan oleh Indonesia dan juga kebutuhan atas transisi teknologi dan lapangan pekerjaan yang disediakan oleh Unilever harus berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

Opini tentang MNCs sebagai agen pembangunan sangat besar dipengaruhi oleh pandangan lama tentang pasar ekonomis yang gratis dimana MNCs seperti Unilever secara akuntabel dan legal melakukan tindakan hanya untuk pemegang saham dan perkembangan industrinya saja (Gafaru, 2006). Pandangan fundamental diatas secara jelas menerangkan dan mendemonstrasikan bahwa dibutuhkan investigasi lebih lanjut untuk menjelaskan bagaimana dampak nyata dari MNCs seperti Unilever terhadap lingkungan dan pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan, terutama di Indonesia. Permasalahan akan dampak dari eksistensi Unilever di Indonesia menjadi penting untuk segera diselesaikan. Maka dari itu, respon dan tanggapan Unilever terhadap permasalahan yang terjadi atas kehadirannya untuk menjaga keseimbangan kebergantungan antara Unilever dan Indonesia untuk pembangunan berkelanjutan yang tersusun di dalam program SDGs yang telah diadopsi oleh Indonesia akan dibahas pada bagian selanjutnya.